



tiga wajib pajak terbaik yakni Hotel Tentrem Yogyakarta, Hotel Inna Garuda dan Hotel Melia Purosani. Sementara untuk restoran terdiri dari McDonald, KFC dan Pizza Hut.

Penguatan
 Dari Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan disahkannya RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, sangat berguna dalam penguatan basis data perpajakan.

Dengan disahkannya Perppu ini, akan sangat bermanfaat bagi penguatan basis data perpajakan, khususnya untuk informasi keuangan milik wajib pajak, yang selama ini terkendala oleh pembatasan dalam undang-undang di sektor keuangan dan undang-undang di bidang perpajakan.

Sri Mulyani saat sidang paripurna DPR di Jakarta, Kamis, mengatakan seluruh informasi yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik secara otomatis maupun berdasarkan permintaan, akan digunakan sebagai penguatan basis data perpajakan dan akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan dalam pembayaran pajak.

Menkeu juga mengatakan, bagi wajib pajak yang telah patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, tidak perlu khawatir karena data atau informasi keuangan yang diterima oleh DJP dapat dikonfirmasi terhadap laporan SPT Tahunan PPh wajib pajak dan tidak ada dasar bagi DJP untuk melakukan penegakan hukum perpajakan wajib pajak dimaksud.

Demikian pula bagi wajib pajak yang telah mengikuti Amnesti Pajak dengan mengungkapkan seluruh harta yang dimiliki dalam Surat Pernyataan Harta (SPH).

"Terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut, untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya telah dinyatakan selesai dan tidak dapat lagi dilakukan penegakan hukum perpajakan oleh DJP," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, pada pertengahan Mei 2017, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang diharapkan bisa menjadi dasar hukum keikutsertaan Indonesia dalam implementasi pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yurisdiksi lain (AEOI) mulai 2018.

Perppu tersebut menyatakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lain dan entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Dengan disahkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang oleh DPR, memberikan keyakinan di dunia internasional bahwa Indonesia mampu dan siap mengimplementasikan Automatic Exchange of Financial Account Information atau AEOI pada bulan September 2018.

Tindak tegas
 Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta juru sita pajak daerah agar menindak tegas para wajib pajak (WP) yang tidak taat membayar pajak.

"Kepada juru sita pajak daerah yang baru saja dilantik pada hari ini, saya minta supaya semua WP yang tidak patuh bayar pajak ditindak tegas," kata Djarot di Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis.

Meskipun demikian, sebelum menindak tegas WP yang tidak taat bayar pajak, juru sita harus menggunakan cara-cara yang persuasif terlebih dahulu. Biar bagaimanapun, cara-cara yang persuasif harus dikedepankan, dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, baru tindak tegas WP yang tidak taat pajak itu.

Tidak hanya menindak tegas, juru sita pajak daerah juga harus mampu menjelaskan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila dengan cara-cara persuasif WP masih membandel, baru dilakukan tindakan tegas. Tujuannya, supaya WP akhirnya bersedia membayar pajaknya.

Mantan Walikota Blitar itu mengungkapkan pihaknya juga tidak akan segan memberikan sanksi kepada juru sita yang terbukti menyalahgunakan jabatannya, bermain-main atau bermain mata dengan WP. Kalau terbukti, maka jabatannya bisa langsung dicopot.

Juru sita agar menjalankan kewajibannya dengan penuh integritas dan tanggung jawab serta jujur. Apabila seluruh juru sita mampu bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak akan memunculkan stigma yang negatif dari masyarakat.

Praktik petugas pajak yang tidak baik atau negatif pada masa lalu harus dihilangkan, kemudian diganti dengan praktik yang lebih baik dengan adanya juru sita ini. ● (*/ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005